



## KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Sebuah Refleksi Kebangkitan Nilai)

*Simon Sabon Ola*

*FKIP Universitas Nusa Cendana*

[sabon\\_ola@yahoo.com](mailto:sabon_ola@yahoo.com)

*Lanny Isabela Dwisyahri Koroh*

*Program Magister Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang*

### Abstract

This paper discusses about several cultural aspects of culture that can be used as a foundation for regional development. The facts show that cultural based development is not yet holistic. There are many cultural values that are neglected in regional development. At least four aspects of development that can take advantage of local-traditional culture, namely: matters of livelihood, matters of government, politics, and matters of religion and belief in God Almighty. The presentation of facts regarding the four things mentioned above is a reflection of the revival of values. This reflection would spur all government policy to take advantage of aspects of local culture as a material consideration in designing and implementing development in the region.

**Keywords:** *culture, development, value.*

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang beberapa aspek budaya yang dapat dijadikan landasan pembangunan daerah. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan berbasis budaya belum menyeluruh. Banyak nilai budaya yang terabaikan dalam pembangunan daerah. Setidaknya ada empat aspek pembangunan yang dapat memanfaatkan budaya lokal-tradisional, yaitu: masalah mata pencaharian, masalah pemerintahan, politik, dan masalah agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyajian fakta mengenai keempat hal tersebut di atas merupakan cerminan dari kebangkitan nilai-nilai. Refleksi ini akan memacu semua kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan aspek budaya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di daerah.

**Kata kunci:** *budaya, perkembangan, nilai.*

### 1. Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota suatu masyarakat senantiasa berada dalam dikotomi. Salah satunya ialah pemikiran dikotomis antara tradisi dan modern. Jika ditarik garis imaji, maka tradisi dipersepsikan berada pada ujung garis yang satu, sedangkan modern berada pada ujung lainnya.

Pemikiran dikotomis ini kemudian melahirkan kegamangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya penghayatan terhadap apa yang dimiliki, sementara "tekanan" modernisasi membuat manusia seakan-akan tidak yakin pada budaya dan nilai-nilai lokal yang telah dimilikinya.

Setelah terjadi pergeseran karena hal modernisasi juga dianggap sebagai sebuah nilai, ada "kerinduan" untuk kembali ke nilai lokal-tradisi. Upaya *back to nature* selalu tidak mencapai hasil optimal karena masyarakat telah mengalami perubahan persepsi. Hal lokal-tradisi berjalan sendiri, sementara masyarakat hidup dengan kebanggaan akan modernisasi dengan persepsi yang keliru.

Pemerintah Daerah menyadari dan "menikmati" sejumlah kegagalan yang konon dianggap sebagai "yang disebabkan oleh pengingkaran terhadap budaya lokal-tradisi". Dari



sini lahirlah pembangunan berbasis budaya. Kondisi ini tidak cukup untuk mereduksi kegagalan pembangunan. Masyarakat, terutama generasi muda dipacu untuk menggapai kecerdasan tektual dengan mengabaikan kecerdasan budaya. Perbaikan taraf hidup digantungkan pada teknologi baru, yang hasilnya belum tentu mengurangi taraf kemiskinan.

Mengapa demikian? Apa cara-cara yang lebih baik dalam menyikapi fenomena ini agar masyarakat tumbuh dalam panduan nilai, dan bukan pada dikotomi tradisi—modern? Berikut ini akan dikupas beberapa hal terkait dengan pembangunan daerah berbasis budaya. Kupasan ini sebagai bahan refleksi (dan introspeksi), tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemegang kebijakan (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk me-repersepsi dikotomi tradisi—modern untuk merumuskan anjakan yang lebih komprehensif bagi pembangunan di daerah.

## 2. Konsep

### 2.1 Pembangunan

Secara etimologis, kata pembangunan dibentuk dengan kata dasar *bangun* dan diberi afiks *peN-an*. Kata *bangun* menurut KBBI (2002:102) berarti 'mulai sadar (insaf) akan nasib'. Pada bagian lain (hlm. 103), kata *pembangunan* tidak dimaknai sebagai derivasi etimologis seperti tersebut di atas. Kata *pembangunan* dimaknai sebagai 'proses, cara, perbuatan membangun'.

Kedua arti tersebut di atas kiranya dapat memberikan pemahaman mengenai konsep pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan ialah proses (yang mencakup cara dan tindakan) membangun sebagai perwujudan kesadaran akan nasib.

Pebangunan juga dilaksanakan atas dasar dikotomi, yang bermuara pada hal perbaikan 'membuat jadi baik, atau membuat jadi lebih baik'. Muara dari pembangunan sesungguhnya adalah kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional: "Mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila".

Pebangunan di daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Orientasi pembangunan itu memerlukan kiat-kiat tertentu. Salah satu di antaranya ialah memanfaatkan sumber daya budaya lokal.

### 2.2 Kebudayaan

Menurut Geertz (dalam Casson, 1981:17) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah sistem makna simbolik (*symbolic meaning system*). Kebudayaan merupakan sistem semiotik berupa simbol-simbol yang berfungsi mengkomunikasikan maksud dari satu pikiran ke pikiran lainnya.

Goodenough (ibid. hlm.17) berpendapat, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan, keyakinan, dan nilai yang berada di dalam pikiran individu anggota masyarakat. Sistem pengetahuan, keyakinan, dan nilai bertugas membangun pandangan dunia (*world view*) individu dalam konteks sosial. Sehubungan dengan itu, kebudayaan sesungguhnya berada di antara individu, bukan pada individu.

Kebudayaan merupakan kesadaran kolektif karena kebermilikan pengetahuan, keyakinan dan nilai kolektif. Dari dimensi ini, dapat dikatakan bahwa individu di luar masyarakat (sosial) dianggap tidak berbudaya karena tidak memiliki ciri kolektivitas.

Pengetahuan, keyakinan dan nilai dimaknai secara holistik dan dimanfaatkan secara bersinergi untuk kepentingan pembangunan. Pengetahuan, keyakinan dan nilai-nilai lokal-tradisi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dar seluruh aspek pembangunan, terutama pembangunan di daerah.



### 3. Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah

Kata *daerah* sering dipertentangkan dengan *pusat*. Daerah dalam konteks negara dipandang sebagai perpanjangan tangan pusat. Sebagai perpanjangan tangan pusat, daerah diharuskan melaksanakan pembangunan sesuai dengan anangan pusat.

Dalam konteks otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya yang penting untuk dilirik ialah sumber daya budaya.

Sumber daya budaya tidak hanya menjadi aset yang bisa menambah penghasilan sebagaimana gagasan wisata budaya, seperti di Bali dan beberapa geyup budaya lain. Sumber daya budaya semacam ini sangat mudah diberdayakan jika pemerintah mempunyai dana. Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kawasan wisata budaya (misalnya rumah adat) dan pengembangan atraksi budaya (misalnya tarian-tarian tradisi).

Peranan kebudayaan sebagai salah satu sumber daya juga mencakup pemberdayaan nilai-nilai tradisi dalam membangun persepsi yang dapat menunjang pemafaatan sumber daya lain bagi pembangunan. Nilai merupakan muatan mental-psikologis yang menuntun masyarakat di dalam bertindak yang berorientasi pada dikotomi baik—buruk.

Di atas dasar dikotomi baik—buruk tersebut masyarakat membangun pandangan mereka terhadap suatu objek. Bahkan dikotomi itu dimanfaatkan masyarakat untuk menilai pemimpinnya. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan hal ini agar pembangunan di daerah menghasilkan kemajuan yang menjunjung tinggi nilai.

Nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat menggambarkan kepribadiannya, sebagaimana dikemukakan oleh Notosusanto:

“Kita tidak bisa berbicara tentang kepribadian kalau kita tidak bertumpu pada nilai-nilai sebab yang menentukan kepribadian kita ialah nilai-nilai kita, yang menentukan kepribadian seseorang adalah nilai-nilai yang dianut dibandingkan dengan nilai-nilai orang lain. Demikian pula nilai-nilai dari suatu masyarakat yang menentukan kepribadian masyarakat itu” (lihat Bagus, 1986:12).

Nilai budaya berpengaruh terhadap perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat.

### 4. Keanekaragaman Etnik

Keanekaragaman etnik menjadi ciri bangsa Indonesia. Dalam bingkai keanekaragaman inilah daerah dibangun. Pembangunan daerah semestinya memperhatikan potensi daerah dengan muatan etniknya.

Berbicara budaya etnik identik dengan budaya lokal. Kata *lokal* selalu dipersepsikan terkait dengan kata *nasional*. Hal ini cukup beralasan karena kebudayaan nasional adalah himpunan berbagai kebudayaan lokal.

Etnik yang mempunyai potensi dan ekologi tertentu perlu diakomodasikan sehingga mereka merasa menjadi bagian dari pembangunan daerah. Potensi dan ekologi mereka harus menjadi pertimbangan serius (selama ini biasa-biasa saja) sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan.

### 5. Fakta Empirik

Pada bagian ini disoroti beberapa bidang pembangunan yang memungkinkan pemanfaatan budaya lokal. Bidang pembangunan dimaksud disandingkan dengan budaya yang secara populer dikenal budaya ekonomi, budaya politik, budaya hukum, dan budaya sosial dan lain-



lain dengan berbagai cakupannya. Istilah-stilah ini dimaknai sebagai ‘persepsi masyarakat tentang...’. Persepsi ini dihubungkan dengan manfaatnya bagi pembangunan.

### 5.1 Hal matapencaharian

Matapencaharian merupakan salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 177—188). Mata pencaharian berhubungan erat dengan faktor ekologi. Ekologi laut, misalnya, secara spesifik mencerminkan budaya kelautan yang membangun persepsi mereka secara berbeda tentang laut dengan ekologi lahan kering.

Dalam kerangka pembangunan daerah, ekologi budaya sangat penting dipertimbangkan di dalam merancang strategi pembangunan. Orang Bajo di Sulamo (Kabupaten Kupang), Wuring (Kabupaten Sikka), dan di Meko (Kabupaten Flores Timur) mempunyai pengetahuan lebih tentang dunia kelautan: arus, jenis hewan laut, cara menangkap ikan, dan berbagai kearifan lokal-kelautan.

Dalam kaitan dengan program Gerakan Masuk Laut (GEMALA), pernahkah masyarakat Bajo menjadi kelompok yang dipertimbangkan dalam rancangan pembangunan daerah? Pertanyaan ini sekedar sebagai bahan refleksi. Dalam bidang olahraga air, pernahkah dimunculkan atlet-atlet yang berasal dari Bajo? Pertanyaan ini sekedar untuk direnungkan. Dalam hal mengantisipasi kecelakaan laut, apakah kearifan lokal Bajo pernah dimanfaatkan? Pertanyaan ini sekedar sebagai bahan pemikiran.

Fakta lain yang perlu diungkap-ulang ialah telah terjadi pergeseran menu makan pada sejumlah etnik di NTT. Makanan pokok ubi-ubian dan jagung telah diganti dengan beras. Sementara ekologi sebagian masyarakat NTT berupa lahan tandus dan ekologi laut yang memerlukan kiat khusus untuk bisa menghasilkan gabah untuk memenuhi kebutuhan beras. Hal ini turut mempengaruhi pola ekonomi dari menghasilkan sendiri ke pola beli.

### 5.2 Hal pemerintahan

Undang-Undang mengenai otonomi daerah memungkinkan diterapkan sistem pemerintahan desa dengan mengadopsi pola lokal-tradisi. Meskipun demikian, ada kecenderungan pemerintah daerah untuk menerapkan desa gaya baru dengan struktur baru pula. Di samping itu, masyarakat desa pun memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pola lama agar tidak dianggap kolot/ terbelakang.

Fakta ini pada beberapa desa telah menimbulkan kegamangan. Masyarakat “dipaksa” untuk mengikuti pola baru, sementara cara pandangnya mengikuti pola lama. Hal ini sering menimbulkan benturan sistem. Masyarakat terpolarisasi: berpikir cara baru dan bertindak dengan cara tradisi, atau berpikir secara tradisi dan bertindak dengan cara baru.

Di samping terpolarisasinya cara pikir dan cara tindak, tidak jarang pula terjadi “gesekan” antara pemerintah desa dengan lembaga adat, khususnya para pemangku adat. Gesekan ini terjadi karena keterbatasan pemahaman terhadap substansi peran masing-masing.

Jika kedua kelompok ini disinergikan, akan tercipta pemerintahan desa yang mengadaplikasikan semua unsur dalam masyarakat desa. Lembaga tradisi diberikan tempat sewajarnya dalam sistem pemerintahan desa sehingga menjadi sumber daya yang menunjang pemerintahan desa.



### 5.3 Hal politik

Pengalaman kita merekam begitu banyak pemanfaatan kekuasaan tradisi untuk urusan politik, apalagi soal suksesi bupati/ wali kota ataupun gubernur. Hal ini biasa dalam menarik simpati masyarakat. Yang menarik ialah dunia politik dan dunia adat-tradisi memiliki cara pandang yang berbeda mengenai konsep “bekerja untuk masyarakat”. Politik cenderung berorientasi pada kepentingan yang secara hierarkis diurutkan: diri—kelompok—masyarakat, sedangkan lembaga adat berkecenderungan bekerja sepenuhnya bagi kepentingan anggota guyup.

Orientasi ini tampak pada keonsistenan. Pemangku adat memperlihatkan ketaatasaan antara pikir—bicara—bertindak. Jika tidak demikian yang dilakukannya, maka diyakini bahwa ia akan mendapat hukuman dari leluhur dan dari Yang Ilahi. Sementara para politisi sering memperlihatkan ketidak-taatasaan antara pikir—bicara—bertindak. (Mungkin terlalu banyak hal yang diurus sehingga sering melupakan janji yang pernah diucapkan).

Untuk kepentingan suksesi misalnya, tak jarang politisi memanfaatkan kredibilitas pemangku adat untuk memperoleh dukungan suara. Para politisi, terutama kandidat kepala daerah tidak malu-malu menawarkan diri menjadi “orang dalam” (*in-group*) pada suatu kelompok adat. Mereka masuk rumah-rumah adat memohon dukungan pemangku adat.

Kondisi semacam ini bermuara pada dua kemungkinan. *Pertama*, ada kerja sama antara politisi dan pemangku adat. Kerja sama semacam ini sangat diharapkan, namun tetap berada di bawah semangat pengabdian. *Kedua*, jika kerja sama itu didasarkan pada semangat mencari keuntungan sepihak, maka kredibilitas pemangku adat menjadi berkurang.

### 5.4 Hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa

Masyarakat lokal tradisi menganut kepercayaan tradisi. Mereka yakin akan adanya Wujud Tertinggi, yang dalam budaya Manggarai disebut *Mori Kraeng*, etnik Lamaholot menyebutnya *Rera Wulan*, orang Tetun menyebutnya *Maromak*, dan berbagai nama lain dalam berbagai etnik.

Masuknya agama (menurut konsep modern) menyebabkan terjadinya perubahan, yang pada awalnya menimbulkan konflik. Masyarakat tradisi belum siap menerima perubahan pada keyakinannya yang sudah sungguh-sungguh mengakar. Konflik yang tampak pada masyarakat sejumlah etnik berwujud “penolakan” terhadap agama. Muncullah tiga kelompok masyarakat pasca masuknya agama, yakni: (1) kelompok orang yang menerima agama dan meninggalkan adat; (2) kelompok orang yang menerima agama tetapi tidak meninggalkan adat; dan (3) kelompok orang yang menolak agama dan tetap memegang teguh adat sebagai keyakinan tradisi.

Ritual tradisi yang mengandung nilai-nilai religi, humanitas dan ekologis sering dianggap sebagai tindakan menyembah berhala. Karena anggapan ini, kini banyak bahasa ritual menjadi ragam “mati” karena ditinggalkan penuturnya.

Pernahkah pemerintah daerah memanfaatkan ritual tradisi untuk membangun nilai religi? Apakah lembaga keagamaan pelaku ritual saling bergandengan satu sama lain? Benarkah ritual tradisi itu merupakan tindakan menyembah berhala? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas cukup untuk direnungkan sebagai bahan refleksi dan introspeksi.

## 6. Penutup

Pembangunan daerah berbasis budaya kini lebih lazim sebagai slogan. Benar bahwa ada kesadaran akan peran budaya tradisi dalam pembangunan. Namun, kesadaran itu belum sepenuhnya terealisasi dalam aksi.

Potret suram bagi budaya lokal sesungguhnya telah menjadi kekhawatiran. Yang menarik ialah pembangunan berbasis budaya tanpa memelihara nilai budaya. Dapatkah



sesuatu yang tidak ada menjadi landasan pijak bagi sesuatu yang lain? Hal ini ibarat bergantung pada akar lapuk.

Pembangunan berbasis budaya harus dimulai dengan meredam dikotomi antra tradisi—modern. Sangat diperlukan kehendak untuk mensinergikan keduanya. Dengan demikian diharapkan budaya lokal-tradisi dalam pembangunan daerah menjadi satu dengan pebaharuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.T. 1981. "Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah Laju Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", dalam Prisma Nomor 11 Tahun X, hal. 19—26. Jakarta: LP3ES.
- Alisjahbana, S.T. 1986. "Indonesia di Tengah bangkitnya Dunia Baru", dalam Deny J. A. *Transformasi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kerja Sama Kelompok Studi Proklamasi dengan The Asia Foundation.
- Arndt, P. 2003a. *Agama Asli di Kepulauan Solor* (Terjemahan Paul Sabon Nama dari Judul Asli: *Religion auf Ostflores, Adonare und Solor*). Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.
- Arndt, P. 2003b. *Falsafah dan Aktivitas Hidup Manusia di Kepulauan Solor* (Terjemahan Paul Sabon Nama dari Judul Asli: *Religion auf Ostflores, Adonare und Solor*). Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.
- Bagus, I G. N. (ed). 1986. *Sumbangan Nilai Budaya Bali dalam Pembangunan Kebudayaan Nasional*. Denpasar: Proyek Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Bali.
- Bao, P. S. O. 1969. *Nusa Nipa, Nama Pribumi Nusa Flores*. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Bawa, I W. dan Cika, I W. (ed). 2004. *Bahasa dalam Perspektif Kebudayaan*. Denpasar: Penerbit Universitas Udayana.
- Casson, R.W. 1981. *Language, Culture, and Cognition*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Duranti, A. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fernandez, S. O. 1990. *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur Dulu dan Kini*. Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik.



- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan* (Terjemahan Fransisco Budi Hardiman, dari judul asli: *The Interpretation of Cultures*). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Geertz, C. 1992. *Agama dan Kebudayaan* (Terjemahan Fransisco Budi Hardiman dari Judul Asli: *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Malinowski, Bronislaw. 1983. *Dinamika Bagi Perubahan Budaya*. Terjemahan Zaharah Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran.
- White, L. and Dillingham, B. 1973. *The Concept of Culture*. New York: Burgess Publishing Company.
- Yusdiafi, S. Z, Jaruki, M. dan Mardiyanto. 2000. *Analisis Struktur dan Nilai Budaya Syair Putri Akal dan Syair Kumbarat*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

